

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TERHADAP PELAYANAN PADA
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG



BULAN APRIL S.D. JUNI 2021

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
TERHADAP PELAYANAN PADA
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Disahkan di Palembang
Pada Hari Senin, 23 Juli 2021



Top Management,



DR. H.KRESNA MENON, S.H., M.Hum
NIP. 19570723 198303 1 003

Sekretaris Tim Survei,

Ketua Tim,

ASNAWI, S.H., M.H.
NIP. 19680315 199303 1 004

HJ.MIEN TRISNAWATY, S.H.,M.H.
NIP. 19620929 198803 2 002

KATA PENGANTAR

Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam upaya Peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur negara pada semua tingkatan.

Berdasarkan hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah mencanangkan program Akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan seperti telah tertuang pada surat Dirjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/DJU/OT01.3/1/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi di lingkungan Badan Peradilan Umum maka perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Program penjaminan mutu tersebut dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja masing masing pelayanan satuan kerja instansi Pengadilan juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik pada Pengadilan.

Oleh karena itu adanya kuisioner ini diharapkan memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dalam hal pengawasan Pengadilan Tinggi Palembang Semoga bermanfaat bagi unit pelayanan instansi pemerintahan maupun masyarakat.

Palembang, 23 Juli 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Palembang,



DR. H.KRESNA MENON, S.H., M.Hum
NIP. 19570723 198303 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Dan Sasaran.....	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Rencana Kerja.....	3
E. Tahapan Pelaksanaan Survei.....	3
BAB II METODE PELAKSANAAN SURVEI	
A. Metode Survei.....	5
B. Sumber Data.....	5
C. Teknik Pengumpulan Data.....	5
D. Variabel Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi.....	5
E. Teknik Analisis Data.....	6
F. Tahap Pelaksanaan Survei.....	6
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	
A. Profil Responden.....	9
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Unsur.....	11
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan.....	15
D. Metode Pengolahan Data.....	16
BAB IV HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN	
A. Survei Perunsur Pelayanan.....	18
B. Prioritas Peningkatan Pelayanan.....	19
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	21
B. Rekomendasi.....	21
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah dan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Sebagai salah satu syarat untuk tercapainya akreditasi penjaminan mutu sebagai pengadilan yang berkualitas yaitu dengan mengadakan survei kepuasan masyarakat sebagai pedomannya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tanggal 8 April 2021 memberlakukan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya dan Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 Mei 2021. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang

cukup besar.

Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di Lingkungannya .

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggaraan pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Tujuan Dan Sasaran

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Rencana Kerja Survei

1. Persiapan Aplikasi

Pengadilan Tinggi Palembang selaku unit pelayanan publik menyediakan layar monitor sentuh (*touch screen*) untuk mengisi Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik

(SISUPER) yang digunakan untuk mengisi Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Pengadilan Tinggi Palembang, Petugas dari unit pelayanan publik membuka Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) dengan tahapan :

- a) Memastikan bahwa komputer yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet.
- b) Membuka Browser / perambahan halaman website;
- c) Membuka

Alamat	Website:
--------	----------

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098938>
- d) Jika berhasil membuka aplikasi maka akan tampil halaman Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Anti Korupsi dan Survei Harian ..

2. Pengisian Survei

- Bagian I : Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan pekerjaan, dan saran yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah.
- Bagian II : Jenis Layanan berupa isian jenis layanan yang diterima oleh responden
- Bagian III : Kuisisioner berupa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh unit layanan publik
- Bagian IV : Kesan dan Pesan berupa isian bebas dari responden terhadap pelayanan Pengadilan

3. Bentuk Jawaban

Desain Bentuk Jawaban dari setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda bentuk pilihan jawaban kuisisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. pembagian jawaban dibagi dalam beberapa kategori :

- 1) Tidak sesuai prosedur, petugas melayani selalu meminta imbalan, selalu, tidak pernah, diberi nilai persepsi 1 dengan mutu pelayanan D.
- 2) Jarang sesuai prosedur, petugas melayani sering meminta imbalan, jarang, sering diberi nilai persepsi 2 dengan mutu pelayanan C.
- 3) Sering sesuai prosedur, sering, jarang, petugas melayani jarang meminta imbalan, diberi nilai persepsi 3 dengan mutu pelayanan B.
- 4) Selalu sesuai prosedur, petugas melayani tanpa meminta imbalan, selalu, tidak ada diberi nilai persepsi 4 dengan mutu pelayanan A.

E. Tahapan Pelaksanaan Survei

- 1) Tim Survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan Teknik *probability sampling*.
- 2) Tim Survei membuat instrument berupa angket/kuesioner.
- 3) Tim Survei melaksanakan kegiatan survei dengan cara mengambil dan mengolah data dari anjungan survei yang ada di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .
- 4) Responden mengisi survei online melalui laman <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098938>
- 5) Tim Survei menyajikan hasil Analisa dalam bentuk deskriptif.
- 6) Hasil Analisa diolah oleh Tim Survei dan diinput kedalam data untuk dibuatkan laporan dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.
- 7) Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang ini dilaporkan kepada Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta dan dipublikasi dalam website Pengadilan Tinggi Palembang.

BAB II

METODE PELAKSANAAN SURVEI

A. Metode Survei

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik kuantitatif sebagai pelengkap. Survei dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang terhadap layanan publik yang diberikan kepada pengguna layanan/masyarakat, survei dilaksanakan secara periodik setiap 3 bulan (triwulan), Pelaksanaan kegiatan saat ini berlangsung pada periode II dari bulan April sampai bulan Juni 2021.

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban terbuka yang terdapat di anjungan PTSP. Populasi penelitian ini adalah para responden yang datang ke Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengisi data anti korupsi pada anjungan si SUPER, sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik mengambil data dari aplikasi siSUPER Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan metode SPAK ini yaitu dengan menyiapkan beberapa persiapan, memuat karakteristik populasi jumlah responden, jumlah kuesioner yang dapat diproses lebih lanjut atau diolah.

B. Sumber Data

Sumber Data dalam Survei Persepsi Anti Korupsi ini menggunakan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Direktorat Badan Peradilan Umum yang tersedia pada mesin layar sentuh (touch screen) di PTSP Pengadilan Tinggi Palembang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk survei persepsi anti korupsi berdasarkan data yang terkumpul dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER), dimana masyarakat pencari keadilan menggunakan layanan Pengadilan Tinggi Palembang setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam satu tahun, untuk periode saat ini periode III Bulan April s.d. Juni 2021

D. Variabel Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi

Variabel pada pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi terdiri dari 10 indikator yaitu:

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh

4. Transparansi Biaya.
5. Biaya Tambahan.
6. Hadiah
7. Transparansi Pembayaran.
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data Persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4 dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan indeks Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. mencari bobot rata-rata setiap indikator.

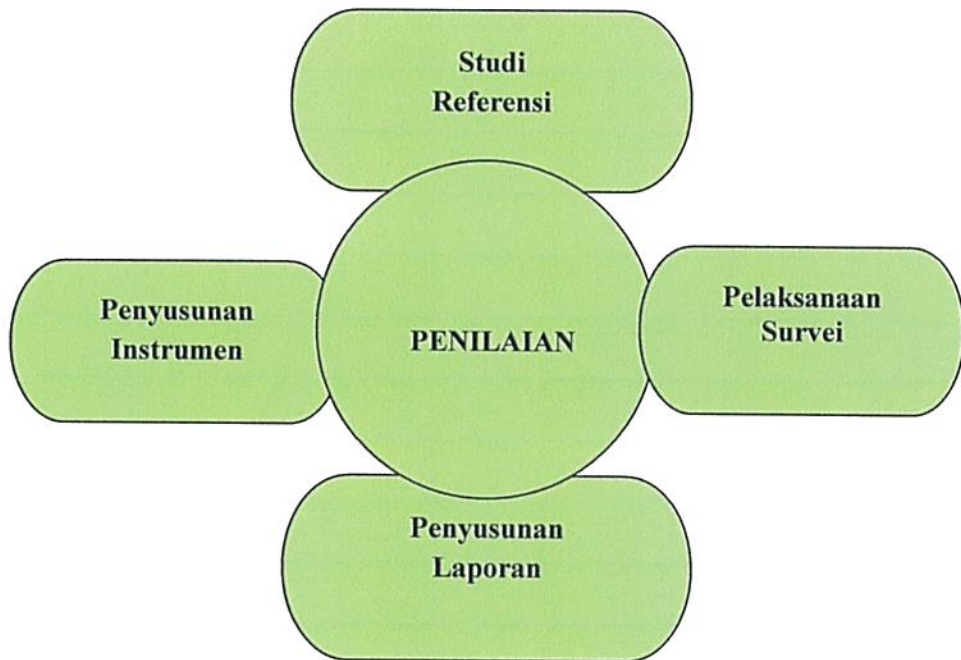
Skala indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

F. Tahap Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

No.	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-2.59	25-64.99	D	Tidak bersih dari korupsi
2	2.60-3.06	65.00-76.61	C	Kurang bersih dari korupsi
3	3.06-3.53	76.61-88.30	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3.53-4.00	88.31-100.00	A	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Tingkat Pendidikan responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat pendidikan responden pada Pengadilan Tinggi Palembang Periode April s.d. Juni 2021 sebagai berikut : SD berjumlah 0 orang, SMP berjumlah 0 orang, SMU 6 orang, Diploma 1 berjumlah 0 orang, Diploma 2 berjumlah 0 orang, Diploma 3 berjumlah 2 orang, S1 berjumlah 12 orang, S2 berjumlah 6 orang, S3 berjumlah 1 orang.

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	0	0
4	SMU	6	22,22
5	D1	0	0
6	D2	0	0
7	D3	2	7,41
8	S1	12	44,44
9	S2	6	22,22
10	S3	1	3,70
JUMLAH		27	100

2. Pekerjaan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data pekerjaan responden pada Pengadilan Tinggi Palembang Periode April s.d. Juni 2021 sebagaimana dalam tabel dibawah ini yaitu :

Tabel 5
Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS	9	33,33
2	TNI	0	0
3	Polri	1	3,70

4	Swasta	5	18,52
5	Wiraswasta	0	0
6	Tenaga Kontrak	0	0
7	Lainnya	12	44,44
JUMLAH		27	100

3. Domisili Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data domisili responden pada Pengadilan Tinggi Palembang Periode April s.d. Juni 2021 berasal dari Sumatera Selatan sebanyak 27 (100%) responden.

Tabel 6
Domisili Responden

NO	DOMISILI	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Sumatera Selatan	27	100
2	Lainnya	0	0
JUMLAH		27	100

4. Data Layanan

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data layanan yang diperoleh oleh masyarakat/responden pada Pengadilan Tinggi Palembang Periode April s.d. Juni 2021 sebagai berikut :

Tabel 7
Jenis Layanan

NO	JENIS LAYANAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Layanan Pidana	1	3,70
2	Layanan Hukum/Informasi	11	40,74
3	Layanan Administrasi Umum	15	55,56
JUMLAH		27	100

5. Data Umur Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data umur responden pada Pengadilan Tinggi Palembang Periode April s.d. Juni 2021 yaitu mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18-28 tahun sebanyak 7 responden, usia antara 29-39 tahun sebanyak 12 responden, usia 40-49 tahun sebanyak 4 responden, usia 50-59 tahun sebanyak 3 responden, usia 60-69 tahun sebanyak 1 responden.

Tabel 8
Data Umur Responden

NO	UMUR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	18-28 Tahun	7	25,93
2	29-39 Tahun	12	44,44
3	40-49 Tahun	4	14,81
4	50-59 Tahun	3	11,11
5	60-69 Tahun	1	3,70
JUMLAH		27	100

B. Indeks Persepsi Korupsi Per-Unsur yaitu :

1. Unsur Manipulasi Peraturan (U1)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 25 (92,59%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Selalu Sesuai Prosedur (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,926”** dimana berada pada nilai interval **3,53-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Tinggi Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 9
Unsur Manipulasi Peraturan

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Sesuai Prosedur	0	0
2	C	Jarang Sesuai Prosedur	0	0
3	B	Sering Sesuai Prosedur	2	7,41
4	A	Selalu Sesuai Prosedur	25	92,59
JUMLAH			27	100

2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 26 (96,30%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,963”** dimana berada pada nilai interval **3,53-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Tinggi Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 10
Unsur Penyalahgunaan Jabatan

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	0	0

2	C	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	0	0
3	B	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	1	3,70
4	A	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	26	96,30
JUMLAH			27	100

3. Unsur Menjual Pengaruh (U3)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil analisis perolehan 26 (96,30%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada indeks rata-rata skor sebesar **“3,889”** dimana berada pada interval skor **3,53-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Tinggi Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 11
Unsur Menjual Pengaruh

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	1	3,70
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	0	0
4	A	Tidak Ada	26	96,30
JUMLAH			27	100

4. Unsur Transparansi Biaya (U4)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan 23 (85,19%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Selalu (A)”** pada indeks rata-rata skor sebesar **“3,741”** dimana berada pada interval skor **3,53-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Tinggi Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 12
Unsur Transparansi Biaya

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Pernah	1	3,70
2	C	Jarang	1	3,70
3	B	Sering	2	7,41
4	A	Selalu	23	85,19
JUMLAH			27	100

5. Unsur Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 25 (92,59%) dari jumlah responden memilih jawaban “**Selalu (A)**” pada indeks rata-rata skor sebesar **3,815**” dimana berada pada interval skor **3,53-4,00** dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Tinggi Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Tabel 13
Unsur Biaya Tambahan

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Pernah	1	3,70
2	C	Jarang	1	3,70
3	B	Sering	0	0
4	A	Selalu	25	92,59
JUMLAH			27	100

6. Unsur Hadiah (U6)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil analisis perolehan 22 (81,48%) dari jumlah responden memilih jawaban “**Tidak Ada (A)**” pada indeks rata-rata skor sebesar **3,556**” dimana berada pada interval skor **3,53-4,00** dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Tinggi Palembang “**Bersih dari Korupsi.**”

Tabel 14
Unsur Hadiah

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	3	11,11
2	C	Sering	1	3,70
3	B	Jarang	1	3,70
4	A	Tidak Ada	22	81,48
JUMLAH			27	100

7. Unsur Transparansi Pembayaran (U7)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan 24 (88,89%) dari jumlah responden memilih jawaban “**Selalu (A)**” pada indeks rata-rata skor sebesar **3,778**” dimana berada

pada interval skor **3,53-4,00** dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Tinggi Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Tabel 15
Unsur Transparansi Pembayaran

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Pernah	1	3,70
2	C	Jarang	1	3,70
3	B	Sering	1	3,70
4	A	Selalu	24	88,89
JUMLAH			27	100

8. Unsur Percaloan (U8)

Dari skala 1 sampai 4 hasil persepsi responden pada indikator Percaloan menunjukkan hasil analisis perolehan 27 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban “**Tidak Ada (A)**” pada indeks rata-rata skor sebesar **4,00**” dimana berada pada interval skor **3,53-4,00** dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Tinggi Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Tabel 16
Unsur Percaloan

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	0	0
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	0	0
4	A	Tidak Ada	27	100
JUMLAH			27	100

9. Unsur Perbuatan Curang (U9)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Perbuatan Curang** ini menunjukkan hasil analisis perolehan 24 (88,89%) dari jumlah responden memilih jawaban “**Tidak Ada (A)**” pada indeks rata-rata skor sebesar **3,852**” dimana berada pada interval skor **3,53-4,00** dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Tinggi Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Tabel 17
Unsur Perbuatan Curang

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	0	0
2	C	Sering	1	3,70
3	B	Jarang	2	7,41
4	A	Tidak Ada	24	88,89
JUMLAH			27	100

10. Unsur Transaksi Rahasia (U10)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Indikator **Transaksi Rahasia** ini menunjukkan hasil analisis perolehan 27 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada index rata-rata skor sebesar **“4,00”** dimana berada pada interval skor **3,53-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Tinggi Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 18
Indikator Transaksi Rahasia

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	0	0
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	0	0
4	A	Tidak Ada	27	100
JUMLAH			27	100

C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan

Dari 10 Indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palembang sebesar **“3,85”**.

Tabel 19
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja
Pada Pengadilan Tinggi Palembang

No	Unsur	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Kategori
1	Manipulasi Peraturan	3,926	0,393	Bersih dari Korupsi
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,963	0,396	Bersih dari Korupsi
3	Menjual Pengaruh	3,889	0,389	Bersih dari Korupsi

4	Transparansi Biaya	3,741	0,374	Bersih dari Korupsi
5	Biaya Tambahan	3,815	0,381	Bersih dari Korupsi
6	Hadiah	3,556	0,356	Bersih dari Korupsi
7	Transparansi Pembayaran	3,778	0,378	Bersih dari Korupsi
8	Percaloan	4,000	0,400	Bersih dari Korupsi
9	Perbuatan Curang	3,852	0,385	Bersih dari Korupsi
10	Transaksi Rahasia	4,000	0,400	Bersih dari Korupsi
NILAI INDEKS SPAK			3,85	

Indeks “3,85” tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan “**Bersih dari Korupsi**”. Nilai interval Indeks Persepsi Korupsi antara **3,26-4,00** dengan konversi indeks persepsi korupsi angka “**81.26-100.00**”.

Tabel 20
Nilai Interval Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Palembang

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Bersih dari korupsi
2	1,76 - 62,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Bersih dari korupsi

Kuesioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan telah diolah secara langsung melalui aplikasi *siSUPER*. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Keputusan MENPAN Nomor 14 tahun 2017, sehingga sudah sesuai dengan standar nasional. Indeks Persepsi Korupsi dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya data diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang didapat sehingga hasil survei dapat lebih bermanfaat

D. Metode Pengolahan Data

Nilai Survei Indeks Persepsi Korupsi dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing- masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 10 indikator pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{10} = 0,10$$

Nilai Rata-Rata Tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPK} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

BAB IV
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

A. Survei Per-unsur Pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai survei komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,10. Hasil nilai rata-rata Skor dan Peringkat pada setiap ruang lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan pengguna layanan Pengadilan dan telah terhitung secara langsung melalui aplikasi siSUPER, sebagaimana tabbel berikut:

Tabel 21
Skor dan Peringkat Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Tinggi Palembang

No.	Indikator	Rata-Rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3,926	Sangat Baik	4
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,963	Sangat Baik	3
3	Menjual Pengaruh	3,889	Sangat Baik	5
4	Transparansi Biaya	3,741	Sangat Baik	9
5	Biaya Tambahan	3,815	Sangat Baik	7
6	Hadiah	3,556	Sangat Baik	10
7	Transparansi Biaya	3,778	Sangat Baik	8
8	Percaloan	4,000	Sangat Baik	1
9	Perbuatan Curang	3,852	Sangat Baik	6
10	Transaksi Rahasia	4,000	Sangat Baik	2

$0,393+0,396+0,389+0,374+0,381+0,356+0,39+0,378+0,400+0,385+0,400$ =Nilai survei adalah 3,85

Dengan demikian, nilai Survei Persepsi Korupsi unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai IPK setelah dikonversi = Penambahan dari seluruh Nilai Rata-Rata Tertimbang maka mendapatkan Hasil IPK
- b. Mutu pelayanan A.
- c. Kinerja unit pelayanan sangat baik.

Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut :

Tabel 22
Kategori Mutu Pelayanan

Nilai persepsi	Nilai Interval SPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00- 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 -3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 -4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

B. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan .

Tabel 23
Nilai Rata-rata (NRR) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (IPK)
10 Unsur/Indikator Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	NRR per-unsur	NRR Pertimbang per-unsur
1	Manipulasi Peraturan	3,926	0,393
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,963	0,396
3	Menjual Pengaruh	3,889	0,389
4	Transparansi Biaya	3,741	0,374
5	Biaya Tambahan	3,815	0,381
6	Hadiah	3,556	0,356
7	Transparansi Pembayaran	3,778	0,378
8	Percaloan	4,000	0,400
9	Perbuatan Curang	3,852	0,385
10	Transaksi Rahasia	4,000	0,400
IPK			3,85

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur- unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval SPK 3,53-4,00 atau Sangat Memuaskan merupakan unsur-unsur/indikator Survei Persepsi Anti Korupsi yang perlu dipertahankan mulai dari nilai tertinggi hingga nilai terendah, yaitu :

Tabel 24
Indeks Tertinggi Hingga Terendah Survei Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Tinggi Palembang
Triwulan II Bulan April s.d. Juni 2021

No.	Kode	Indikator	Nilai	Nilai Rata-Rata
1	U8	Percaloan	108	4,000
2	U10	Transaksi Rahasia	108	4,000
3	U2	Penyalahgunaan Jabatan	107	3,963
4	U1	Manipulasi Peraturan	106	3,926
5	U3	Menjual Pengaruh	105	3,889
6	U9	Perbuatan Curang	104	3,852
7	U5	Biaya Tambahan	103	3,815
8	U7	Transparansi Pembayaran	102	3,778
9	U4	Transparansi Biaya	101	3,741
10	U6	Hadiah	96	3,556

Dari tabel diatas dapat kita peroleh data yaitu tiga unsure tertinggi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Palembang Triwulan II Bulan April s.d. Juni 2021 yaitu :

- 1) Unsur Percaloan (U8)
- 2) Unsur Transaksi Rahasia (U10)
- 3) Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2)

Adapun Tiga unsur terendah dalam Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Palembang Triwulan II Bulan April s.d. Juni 2021 yaitu :

- 1) Unsur Hadiah (U6)
- 2) Unsur Transparansi Biaya (U4)
- 3) Unsur Transparansi Pembayaran (U7)

Dalam rangka mewujudkan komitmen publik yang lebih baik, maka survei tentang opini publik dalam hal kepuasan masyarakat atas pelayanan Pengadilan Tinggi Palembang, dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan dipertahankan ataupun ditingkatkan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Hasil Survei persepsi korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Tinggi Palembang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Palembang memiliki indeks persepsi korupsi 3,85 masuk pada kategori mutu kinerja Sangat Baik.

Indeks persepsi korupsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 unsur yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Unsur Manipulasi Peraturan mendapat indeks 3,926
2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan mendapat indeks 3,963
3. Unsur Menjual Pengaruh mendapat indeks 3,889
4. Unsur Transaksi Biaya mendapat indeks 3,741
5. Unsur Biaya Tambahan mendapat indeks 3,815
6. Unsur Hadiah mendapat indeks 3,556
7. Unsur Transparansi Pembayaran mendapat indeks 3,778
8. Unsur Percaloan mendapat indeks 4,000
9. Unsur Perbuatan Curang mendapat indeks 3,852.
10. Unsur Transaksi Rahasia mendapat indeks 4,000.

B. Rekomendasi

Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dan seluruh pegawai di Pengadilan Tinggi Palembang, hendaknya perlu meningkatkan pelayanannya disemua ruang lingkup pelayanan terutama :

1. Agar SOP masing-masing bagian agar disosialisasikan lagi oleh Pimpinan.
2. Agar seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Palembang dalam memberikan pelayanan sesuai dengan SOP.
3. Agar lebih meningkatkan profesionalisme mulai dari Pimpinan, Hakim Tinggi dan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Semua Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Seluruh Jajaran Pengadilan Tinggi Palembang mulai dari Ketua (unsur pimpinan), Hakim Tinggi, ASN dan honorer harus mengedepankan konsep bersih dan melayani kepada masyarakat pencari keadilan yang menggunakan layanan Pengadilan Tinggi Palembang.

LAMPIRAN

19	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4
20	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4
21	A	4	A	4	A	4	D	1	A	4	A	4	D	1	A	4	A	4	A	4	B	3	A	4
22	B	3	A	4	A	4	B	3	D	1	A	4	D	1	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4
23	A	4	A	4	A	4	C	2	A	4	B	3	C	2	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4
24	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4
25	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4
26	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4
27	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4	A	4
Jumlah Nilai Per Unsur	106,000	107,000	105,000	101,000	103,000	96,000	102,000	108,000	104,000	108,000														
NRR per Unsur	3,926	3,963	3,889	3,741	3,815	3,556	3,778	4,000	3,852	4,000														
NRR tertimbang	0,393	0,396	0,389	0,374	0,381	0,356	0,378	0,400	0,385	0,400														
Jumlah NRR tertimbang	3,852																							
IPAK	96,30																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Manipulasi Peraturan	Penyalahgunaan Jabatan	Menjual Pengaruh	Transparansi Biaya	Biaya Tambahan	Hadiah	Transparansi Pembayaran	Percaloan	Perbuatan Curang	Transaksi Rahasia
A 25	A 26	A 26	A 23	A 25	A 22	A 24	A 27	A 24	A 27
B 2	B 1	B 0	B 2	B 0	B 1	B 1	B 0	B 2	B 0
C 0	C 0	C 0	C 1	C 1	C 1	C 1	C 0	C 1	C 0
D 0	D 0	D 1	D 1	D 1	D 3	D 1	D 0	D 0	D 0

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Pengabdian Tinggi Palembang
e-Survey Operator

Navigation
Beranda

SPAK

- o Register Responden IPAK
- o Kesan & Pesan Responden
- o **Perhitungan Indeks**
- o Register Tindak Lanjut

SKM

Survey Harian

Peta Survey Pengabdian

Indeks Total

Data Umum Responden

Data Domisil Responden

Data Umur Responden

Data Layanan

Nilai Per Unsur

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

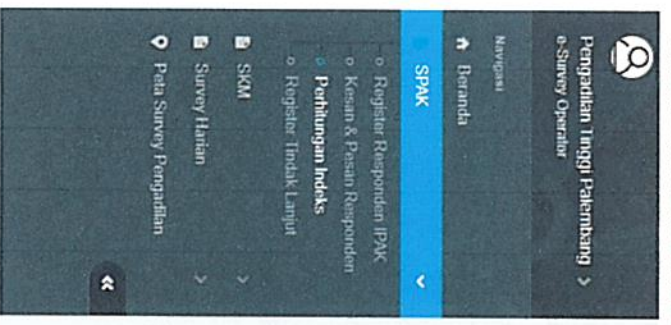
3,85

Periode 1 April 2021 sampai 30 Juni 2021

JUNJAH	27 RESPONDEN
JENIS KELAMIN	LAKILAKI : 18 ORANG
PEREMPUNAN	9 ORANG
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG Diploma 2 : 0 ORG Diploma 3 : 2 ORG SD : 0 ORG SMP : 0 ORG S1 : 12 ORG SMU : 6 ORG S2 : 6 ORG Diploma 1 : 0 ORG S3 : 1 ORG
PEKERJAAN	PNS : 9 ORG SIWASTA : 5 ORG TNI : 0 ORG W/RAUSAHA : 0 ORG POLRI : 1 ORG TENAGAKONTRAK : 0 ORG LAINNYA : 12 ORG

28°C Cerah 14:29 16/06/2021

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

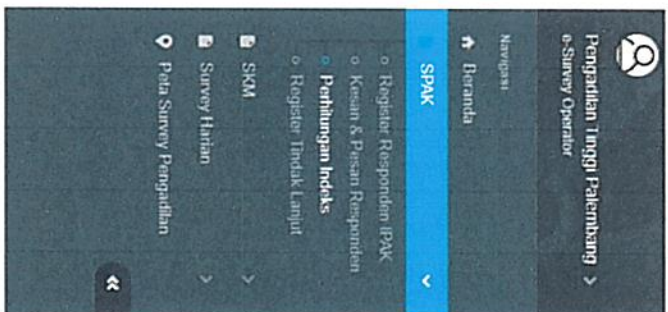


NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Preview Publikasi

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
Deskripsi		Jumlah (Orang)			% (Persen)
18 - 28 Th		7			25.93
29 - 39 Th		12			44.44
40 - 49 Th		4			14.81
50 - 59 Th		3			11.11
60 - 69 Th		1			3.70
Total		27			

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

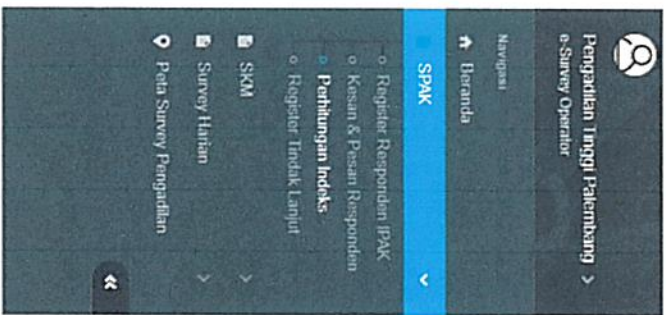


Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur						
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	106	107	105	101	103	96	102	108	104	108	
NRR Per RL	3.926	3.963	3.889	3.741	3.815	3.556	3.778	4.000	3.852	4.000	38.519
NRR Terimbang	0.393	0.396	0.389	0.374	0.381	0.356	0.378	0.400	0.385	0.400	3.852
IPAK Unit Pelayanan											3.85

EVALUASI NILAI UNSUR

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	96 U6
2	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	101 U4
3	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	102 U7

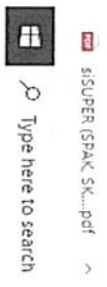
APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



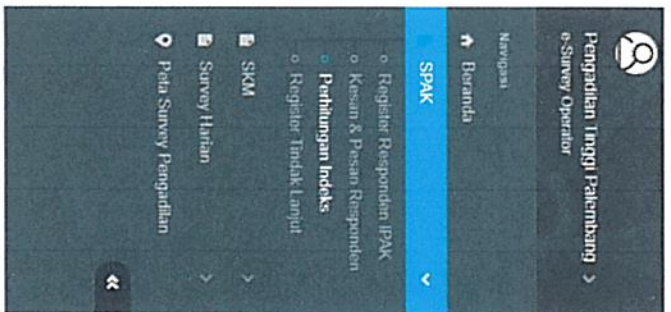
Indeks Total	Data Umum Responden	Data Demografi Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur						
Deskripsi	4 U1	5 U2	5 U3	5 U4	7 U5	10 U6	8 U7	1 U8	6 U9	2 U10	Keterangan
Jumlah	106	107	105	101	103	96	102	108	104	108	
NRR Per RL	3.926	3.963	3.889	3.741	3.815	3.556	3.778	4.000	3.852	4.000	38.519
NRR Terimbang	0.393	0.396	0.389	0.374	0.381	0.356	0.378	0.400	0.385	0.400	3.852
IPAK Unti Pelayanan											
3.85											

EWALUASI MULAI UNSUR

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah pernah mengetahui ada praktik percolan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	108
2	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staf Pengadilan diluar persidangan ?	108
3	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	108



APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



sisUPER (SPAK SKM.pdf)

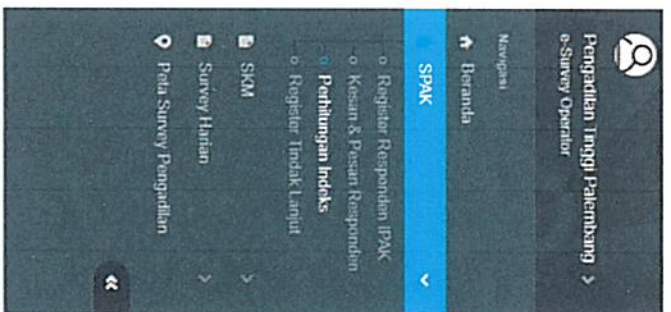
Type here to search

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Preview Publikasi

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domestik Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
Layanan					
					Jumlah (Orang)
1	Layanan Pidana				1
2	Layanan Hukum / Informasi				11
3	Layanan Administrasi Umum				15

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



Nilai Indeks & Detail Responden

Pilih Satuan Kerja Periode Triwulan Pilih Periode 2021 Tampilkan Data

Preview Publikasi

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
		Daerah Domisili		Jumlah (Orang)	
1	SUMATERA SELATAN			27	

Copyright © 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum All Rights Reserved. Waktu Eksekusi : 1.8404, Penggunaan Memori : 3.82MB

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
	IPAK- 75897887E9														
25	M.Dicky Reynaldo R-098938- IPAK- 6B60A38148	SUMATERA SELATAN	22 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Mei 2021
26	Abel R-098938- IPAK- 0E6F36F3AF	SUMATERA SELATAN	28 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 April 2021
27	Tinda R-098938- IPAK- 805883C2B8	SUMATERA SELATAN	34 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 April 2021